

BAB I

PENDAHULUAN

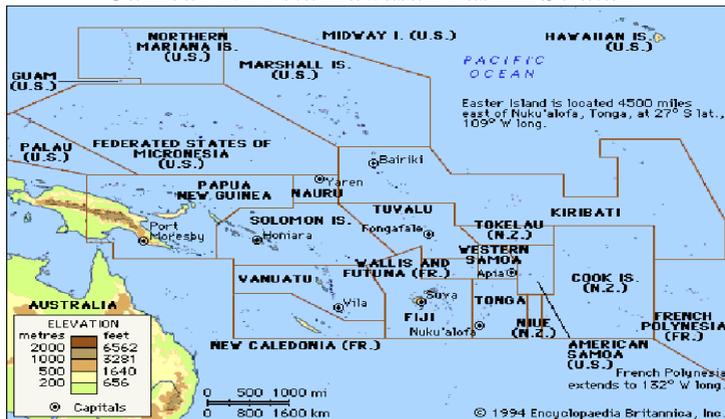
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut Politik Luar Negeri ‘Bebas Aktif’. Politik Luar Negeri ‘Bebas Aktif’ disini maksudnya yaitu politik “Bebas”, berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok kekuatan negara-negara *super power* dan memiliki jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dunia (Hatta, 1953, p. 444). Dengan Politik Bebas Aktif tersebut Indonesia bisa melakukan hubungan kerjasama dengan banyak negara serta organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat regional maupun global selama tidak bertentangan dengan dasar Politik Bebas Aktif Indonesia, serta Indonesia bisa memperoleh kepentingan nasionalnya, karena bagaimanapun semua hubungan internasional berorientasikan pada kepentingan nasional negaranya masing-masing (Jackson & Sorensen, 2005, p. 89).

Indonesia sendiri, meskipun menganut Politik Bebas Aktif dalam melakukan hubungan luar negeri, pada kenyataannya Indonesia tetap memprioritaskan kepentingan nasional dalam menjalankan politik luar negerinya, hal tersebut dapat dilihat dari lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia. Dalam lingkaran konsentrisnya, Indonesia menempatkan Asia Tenggara sebagai lingkaran konsentris pertamanya, meskipun Indonesia wilayahnya tidak satupun yang berbatasan langsung dengan daratan Asia tetapi Indonesia lebih merasa sebagai bangsa Asia ketimbang bangsa Pasifik. Ditambah lagi dengan adanya ASEAN, sebuah organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang sangat memberikan pengaruh bagi kemajuan perekonomian Indonesia (Smith, 2000, p. 22). Lingkaran konsentris Indonesia yang kedua yaitu ASEAN + 3 (Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan), dan lingkaran konsentris

selanjutnya yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa (KEMENLU, 2015).`

Gambar 1.1 Peta Kawasan Pasifik Selatan



Sumber : www.britannica.com

(<https://www.britannica.com/place/Pacific-Islands>)

Kawasan Pasifik terutama kawasan Pasifik Selatan yang secara geografis hampir sama jaraknya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, selama ini belum masuk ke dalam lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia bahkan negara-negara di kawasan tersebut hanya dianggap sebagai “halaman belakang” bagi Indonesia. Ada banyak hal yang menyebabkan Kawasan Pasifik Selatan belum menjadi lingkaran konsentris Indonesia, *pertama*, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan merupakan negara-negara Kepulauan yang kecil dan mayoritas menggantungkan perekonomian pada sektor pariwisata dan tambang (kecuali Australia dan Selandia Baru), sehingga kurang menguntungkan bagi Indonesia. *Kedua*, ketika negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mengalami dekolonisasi dan memperjuangkan kemerdekaannya pada dekade 1960-1980-an Indonesia sedang mengalami masa transisi kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, sehingga kurang memperhatikan dinamika di kawasan tersebut. *Ketiga*, sejak

terjadinya dekolonisasi di kawasan Pasifik Selatan yang masih berjalan hingga saat ini, mulai muncul semangat keetosentrisme antar sesama negara-negara di kawasan tersebut, salah satunya yaitu *Melanesian Way* (Jalan Melanesia). Semangat tersebut yang kemudian memunculkan sikap anti-Indonesia dari masyarakat negara-negara ras Melanesia karena Indonesia dianggap telah menjajah dan dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap ras Melanesia di Papua, sehingga Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan kerap kali berbeda pandangan tentang isu Papua di forum-forum internasional, terutama di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perlu diketahui bahwa kawasan Pasifik Selatan dihuni oleh tiga ras besar, yaitu Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia. *Melanesian Way* merupakan sebuah gerakan yang digagas oleh masyarakat di negara-negara yang mayoritas penduduknya merupakan ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan. Gerakan ini bertujuan untuk meneguhkan identitas, budaya, dan gagasan tentang masa depan ras Melanesia di seluruh dunia atau biasa lebih sering disebut dengan Melanesianisme. Negara-negara tersebut yaitu, Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Kaledonia Baru. Secara umum, ras Melanesia merupakan ras yang berkulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat serta memiliki profil tubuh atletis (Firman, 2016).

Melanesian Way mendorong munculnya perjuangan ras Melanesia di seluruh dunia untuk bisa menentukan nasibnya sendiri dan tidak dijajah oleh ras lain, dalam hal ini fokus mereka yaitu memperjuangkan ras Melanesia di Kaledonia Baru dari Perancis dan Papua dari Indonesia. Untuk memperjuangkan gagasan mereka tersebut dibentuklah organisasi sub-regional di kawasan Pasifik Selatan yang beranggotakan negara-negara ras Melanesia, yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Anggota dari MSG yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, Vanuatu dan *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS) Kaledonia Baru.

Meskipun Indonesia selama ini hanya menganggap kawasan Pasifik Selatan sebagai “halaman belakang”, tetapi Indonesia juga tidak menutup hubungan luar negerinya dengan negara-negara di kawasan tersebut. Tercatat Indonesia memiliki Kantor Kedutaan Besar resmi di Papua Nugini, Fiji, dan Kaledonia Baru. Isu pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang terus dihembuskan oleh negara-negara Melanesia membuat Indonesia mau tidak mau harus melakukan kebijakan *Look East Policy*. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Indonesia mencoba mendekati diri dengan negara-negara ras Melanesia tersebut, salah satunya dengan cara mengirimkan delegasi ke KTT MSG pada 2011 yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai *observer* di organisasi sub-regional tersebut.

Selain itu, Presiden SBY juga telah melakukan kunjungan kenegaraan perdana Presiden Republik Indonesia ke kawasan Pasifik Selatan yaitu ke Fiji pada 14-19 Juli 2014. Pada kesempatan kunjungannya ke Fiji tersebut Presiden SBY juga hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *The Pacific Islands Development Forum* ke-2, Presiden SBY juga mendapat kesempatan *major a policy speech* dan menjelaskan kepada para petinggi negara-negara Pasifik tentang kondisi terkini di Papua dan membantah adanya pelanggaran HAM oleh militer Indonesia di Papua (Prihandoko, 2014).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai pada 20 Oktober tahun 2014 silam, Indonesia berusaha meningkatkan hubungan dengan negara-negara ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan. Hal tersebut dibuktikan peningkatan status Indonesia dari yang sebelumnya hanya *observer* dari tahun 2011 kemudian menjadi *associate member* di organisasi sub-regional *Melanesian Spearhead Group* (MSG) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 MSG pada tanggal 26 Juni 2015 di Honiara, Kepulauan Solomon (Arisandy, 2015). Dengan ditingkatkannya status Indonesia tersebut menjadikan Indonesia bisa berperan lebih di dalam organisasi tersebut, baik untuk kemajuan bersama maupun untuk kepentingan nasional Indonesia. Status tersebut juga

menjadi kesuksesan Indonesia dalam diplomasi kepada negara-negara anggota MSG, karena pada saat bersamaan kelompok pro-kemerdekaan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) juga mengajukan diri untuk menjadi anggota MSG, ULMWP akhirnya harus puas hanya sebagai observer di MSG (Retaduari, 2016).

Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir yang mewakili pemerintah RI dalam KTT memberikan pernyataan yang dikutip dari *Metrotvnews.com* bahwa :

"Peningkatan status sebagai associate member, Indonesia berkomitmen untuk terus mempromosikan kerja sama yang erat dan konkrit dengan MSG untuk menggali potensi dan mengatasi tantangan pembangunan bersama," (Nugraha, 2015)

Peningkatan status Indonesia di MSG juga akan meningkatkan kerjasama konkret dengan negara anggota MSG. Nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara MSG pada tahun 2015 mencapai US\$260 juta. Nilai itu bisa meningkat seiring dengan melemahnya pengaruh Australia dan Selandia Baru di kawasan Pasifik Selatan. Kerja sama teknis di berbagai bidang yang selama ini telah berjalan dan akan terus dipererat. Misalnya di bidang perikanan, pembuatan kerajinan tangan, seni budaya, dan diplomasi. Hingga Mei 2015, Indonesia telah melakukan 130 program kerja sama teknis untuk peningkatan kapasitas dengan negara anggota MSG, yang diikuti 583 peserta (Andhika, 2015)

Presiden Joko Widodo juga menunjukkan sikap bahwa Indonesia akan lebih fokus pada negara-negara Melanesia tercermin dari tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, misalnya tamu kenegaraan yang diterima pada hari kerja pertama Presiden Joko Widodo paska dilantiknya dirinya sebagai Presiden RI yaitu Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Niel (Kisdiantoro, 2014). Kemudian, Presiden Jokowi pada Februari 2015 juga telah mengutus Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk mengunjungi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yaitu ke Papua Nugini, Kepulauan

Solomon, dan Fiji untuk membicarakan peningkatan hubungan Indonesia dan ketiga negara tersebut. Ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Milner Tozaka di Honiara Menlu Retno mengakui pentingnya prinsip saling menghormati integritas teritorial dalam membangun hubungan bilateral kedua negara di samping memperkuat kerja sama bidang ekonomi dan hubungan antar masyarakat terutama melalui peningkatan kapasitas dan bantuan teknis (Nasution, 2016).

Kemudian Presiden Jokowi juga mengutus Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan untuk kembali berkunjung ke kawasan Pasifik Selatan, yaitu ke Papua Nugini dan Fiji pada 30 Maret-3 April 2016 semakin meneguhkan keseriusan Jakarta dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Menteri Luhut memberikan pernyataan sebelum keberangkatannya yang dikutip dari CNNIndonesia.com bahwa:

“Kami (pemerintah Indonesia) belum pernah membuat program terpadu mengenai penanganan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon, dan Fiji. Para duta besar sudah memberikan masukan kepada kami (pemerintah RI). Sekarang akan lebih terintegrasi siapa akan melakukan apa. Fiji sangat mendukung kita (Indonesia). Fiji semacam *center of gravity* di sana. Kedepan kita bikin lebih bagus. Sekarang saja kita jarang berkunjung ke sana, bagaimana mau lebih baik. Mungkin kita kurang memberikan perhatian kepada daerah itu. Padahal daerah itu sangat berpengaruh terhadap Papua”(Kusumawati, 2016).

Pada kesempatan itu Menteri Luhut juga menyerahkan senilai lima juta dolar AS untuk membantu para korban Topan Winston yang menghantam wilayah negara itu Februari 2016 lalu. Pada kesempatan tersebut Menteri Luhut juga membawa surat Presiden Joko Widodo untuk Perdana Menteri Fiji J.V. Bainimarama dan menyampaikan keinginan Presiden Jokowi

agar Indonesia semakin memiliki peran dalam memajukan kawasan Pasifik Selatan terutama negara-negara ras Melanesia, karena bagaimanapun Indonesia juga memiliki masyarakat ras Melanesia sebanyak 1,1 jiwa yang tersebar di lima Provinsi di Kawasan Indonesia Timur, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua (KOMPAS, 2016).

Pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 20 April 2015 lalu, Menteri Luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyempatkan diri untuk bertemu perwakilan dari MSG, perwakilan tersebut menyampaikan bahwa mereka mengharapkan peran lebih Indonesia di MSG. Kemudian Menlu Retno juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Vanuatu Sato Kilman, Kilman menyampaikan bahwa Vanuatu ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia dan mengharapkan Indonesia untuk lebih mengambil peran di kawasan Pasifik Selatan. Vanuatu juga berencana untuk membuka Kedutaan Besar mereka di Jakarta dalam waktu dekat (Andhika, 2015). Hal tersebut menjadi sinyal positif bagi Indonesia, mengingat selama ini Vanuatu merupakan negara yang lantang menyuarakan dukungan terhadap upaya kemerdekaan Papua di dunia internasional. Pada kesempatan itu Menlu juga bertemu dengan perwakilan Fiji dan Papua Nugini.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke Kawasan Pasifik Selatan, yaitu tepatnya ke Papua Nugini pada 12 Mei 2015. Pada kunjungannya tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Papua Nugini merupakan tetangga penting bagi Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan kerjasama antar kedua negara, baik dibidang ekonomi serta keamanan bersama antar negara (Humas Setkab, 2015). Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Papua dijadikan prioritas dalam pembangunan infrastruktur nasional, Presiden Jokowi yakin bahwa pembangunan infrastruktur merupakan jalan yang tepat untuk menggerus kesenjangan antara wilayah Indonesi Barat dan Indonesia Timur, sehingga kesejahteraan rakyat Papua dapat

ditingkatkan. Selain itu, Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua, salah satu contohnya yaitu memberikan grasi kepada tahanan politik Papua (BBC, 2015).

Dengan upaya Indonesia dalam meningkatkan hubungan luar negeri antara Indonesia dengan negara-negara ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan yang dibuktikan dengan peningkatan status Indonesia yang sebelumnya *observer* di masa pemerintahan Presiden SBY kemudian menjadi *associate member*, kerapnya kunjungan pejabat penting pemerintah Indonesia baik itu Presiden maupun Menteri dalam kurun waktu hanya 2 (dua) tahun, pemberian bantuan baik berupa dana maupun jasa, dan kerjasama-kerjasama baru yang diadakan antara Indonesia dan negara-negara Melanesia menjadikan babak baru dalam hubungan Indonesia dan negara-negara Melanesia tersebut.

Komitmen Presiden Jokowi melalui visi Nawa Citanya, melakukan pembangunan signifikan dan memberikn perhatian lebih terhadap Papua yang selama ini notabene menjadi batu pengganjal hubungan antara Indonesia dengan negara-negara ras Melenasia sedikit demi sedikit dapat terkikis. Tidak menutup kemungkinan kawasan Pasifik Selatan juga akan menjadi lingkaran konsentris politik luar negeri seperti Asia Tenggara, bahkan Indonesia bisa menjadi pintu gerbang integrasi antara kawasan Asia Tenggara dengan Kawasan Pasifik Selatan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan pada skripsi ini yaitu : ***“Mengapa Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2016) meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara Melanesia ?”***

B. Landasan Teoritik

Model Aktor Rasional (*Rational Actor*) Graham T. Allison

Sebuah proses kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara tentu saja tidak dibuat dengan sembarangan oleh para pengambil kebijakan di negara tersebut. Kebijakan luar negeri keluar biasanya melalui proses analisis yang panjang dengan data dan fakta yang akurat. Kebijakan luar negeri juga tidak lepas dari kepentingan nasional, dimana suatu negara dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri tentu memikirkan *feedback* untuk negaranya. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri yang di ambil oleh sebuah negara telah melalui proses kalkulasi untung dan rugi bagi negara tersebut.

Salah satu tokoh yang menganalisis proses kebijakan luar negeri yaitu Graham T. Allison, dimana dalam jurnalnya yang berjudul *The American Political Science Review (Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis)* (Allison, 1969, pp. 689-718) menyatakan bahwa :

“The assumption of rational behavior not just of intelligent behavior, but of behavior motivated by conscious calculation of advantages, calculation thalt in turn is based on an explicit and internally consistent value system.”

Dalam menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri menurut Graham T. Allison dapat digunakan Model Kebijakan Rasional (*rational policy model*). Proses kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternal internasional. Allison membuat kajian politik luar negeri yang revolusioner karena dianggap menantang asumsi rasionalisme dalam politik luar negeri yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dan sedikit banyak dianut juga oleh realisme dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara. Dalam asumsi rasionalisme, tindakan

suatu negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Politik luar negeri dilihat sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional.

Dalam perspektif "*Decision Making Process*", Graham T Allison mengajukan tiga paradigma yang dapat digunakan untuk mempermudah menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara di dunia, yaitu Model Aktor Rasional (MAR), Model Proses Organisasi (MPO), dan Model Politik Birokratik (MPB). Model Aktor Rasional menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif atau opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent. Model ini dalam pengambilan kebijakannya lebih menekankan kepada peran pihak eksekutif, yaitu Presiden atau Kepala Pemerintahan dari suatu negara. Hal tersebut dikarenakan model Aktor Rasional ini biasanya digunakan pada saat masa krisis, sehingga membutuhkan keputusan sesegera mungkin dengan pertimbangan alternatif-alternatif yang ada. Keputusan yang diambil tentu saja keputusan dengan risiko terkecil dan keuntungan terbesar bagi negara tersebut.

Asumsi dasar perspektif model aktor rasional yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancah politik global. Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada.

Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional akan memilih kebijakan berdasarkan alternatif-alternatif yang ada dengan pertimbangan memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dan risiko yang paling rendah dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjabarkan posisi Indonesia yang berada dalam masa krisis terkait dengan isu Papua di dunia internasional. Negara-negara Melanesia yang kerap menyerukan tentang pelanggaran HAM Pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua di forum-forum internasional, sehingga Indonesia bisa menjadi sorotan dunia internasional seperti yang terjadi pada isu Timor Timur pada tahun 1997 lalu. Serta adanya upaya dari *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* untuk menjadi anggota dari *Melanesia Spearhead Group (MSG)* akan semakin mempersulit Indonesia, karena organisasi sub-regional Kawasan Pasifik Selatan tersebut tentu akan semakin menambah dukungan bagi kelompok sparatis Papua.

Isu Papua menjadi krisis bagi pemerintah Indonesia karena hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia yang utama yaitu kedaulatan. Penting bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan, karena kedaulatan merupakan kepentingan nasional sebuah negara yang tidak dapat ditawar dan diganggu gugat. Sebuah negara akan diakui sebagai negara yang berdaulat jika memiliki wilayah, penduduk, konstitusi, serta pengakuan secara *de facto* dan *de jure* dari negara berdaulat lainnya. Jika ada negara atau organisasi internasional yang tidak mengakui

legitimasi Indonesia atas salah satu wilayahnya (Papua), maka kedaulatan Indonesia terancam.

Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo harus bertindak sebagai Aktor Rasional untuk menentukan kebijakan terbaik yang akan diambil untuk menanggulangi krisis ini. Salah satu kebijakan rasional yang harus diambil yaitu menyikapi negara-negara Melanesia yang mendukung kelompok separatis Papua yang juga tergabung didalam MSG. Menurut penulis Pemerintah Indonesia memiliki tiga alternatif untuk menyikapi negara-negara tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Indonesia meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara Melanesia anggota MSG.
2. Indonesia tetap mempertahankan hubungan seperti ini, tidak perlu ada yang ditingkatkan dari hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara Melanesia.
3. Indonesia menurunkan hubungan serta bersikap tegas terhadap negara-negara Melanesia terutama tentang isu Papua.

Dari 3 (tiga) alternatif yang dapat dipilih oleh Presiden Jokowi tersebut tentu saja ada kalkulasi untung rugi dari setiap alternatif yang ada. Disini penulis telah menganalisis kalkulasi untung rugi dari setiap alternatif yang ada, penulis mjabarkannya melalui tabel berikut :

Tabel 1.1 Kalkulasi Untung dan Rugi Dari Semua Alternatif

No	Pilihan Alternatif	Keuntungan	Kerugian
1.	Meningkatkan Hubungan	<p>1. Indonesia dapat memberikan informasi yang valid terkait kondisi Papua terkini.</p> <p>2. Indonesia bisa menggunakan politik “Budi Baik” melalui bantuan-bantuan kepada negara-negara Melanesia.</p> <p>3. Indonesia dapat memberikan <i>influence</i> kepada negara-negara Melanesia dalam membuat kebijakan luar negeri terkait isu Papua.</p> <p>4. Indonesia bisa memperbaiki citranya di dunia internasional. Sehingga dapat menghindari referendum jilid II.</p> <p>5. Membuka peluang kerjasama ekonomi sub-regional dengan</p>	<p>1. Indonesia harus mengeluarkan anggaran lebih untuk memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara Melanesia.</p> <p>2. Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap negara-negara Melanesia serta selalu hadir disetiap forum dan isu-isu yang sedang berkembang di Kawasan Pasifik Selatan.</p> <p>3. Indonesia harus mengirimkan teknisi-teknisi untuk membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia di negara-negara Melanesia.</p>

		<p>negara-negara Melanesia.</p> <p>6. Membuka peluang investasi kepada investor asal Indonesia di negara-negara Melanesia.</p> <p>7. Indonesia bisa menjadi pintu gerbang integrasi ekonomi antara ASEAN dan MSG.</p> <p>8. Negara-negara Melanesia dapat menjadi <i>market</i> baru bagi produk-produk Indonesia.</p> <p>9. Indonesia dapat menjadi <i>leader</i> dalam upaya kerjasama keamanan kawasan di Pasifik Selatan.</p>	
2.	Mempertahankan Hubungan	<p>1. Indonesia tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara Melanesia.</p> <p>2. Indonesia tidak perlu selalu</p>	<p>1. Indonesia tidak dapat memberikan data-data valid terkait kondisi Papua terkini kepada negara-negara Melanesia.</p> <p>2. Indonesia tidak dapat memberi <i>influence</i> kepada negara-negara</p>

		<p>hadir di forum ataupun isu yang berkembang di Kawasan Pasifik Selatan.</p> <p>3. Indonesia tidak perlu mengirimkan teknisi-teknisi untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia di negara-negara Melanesia.</p> <p>4. Indonesia cukup menggunakan Hak Jawab dalam setiap pertanyaan atau tuduhan dari negara-negara Melanesia terhadap Indonesia terkait isu Papua.</p>	<p>Melanesia terhadap kebijakan luar negeri mereka terkait isu Papua.</p> <p>3. Indonesia tidak bisa mengontrol argument maupun tuduhan negara-negara Melanesia kepada Indonesia di forum-forum internasional ataupun media terkait isu Papua.</p> <p>4. Dukungan terhadap kelompok sparatis Papua dari negara-negara Melanesia berpeluang meningkat serta berpeluang bertambah dari negara-negara di luar Melanesia.</p>
3.	Menurunkan Hubungan	<p>1. Indonesia tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara Melanesia.</p> <p>2. Indonesia tidak perlu selalu hadir di forum ataupun isu yang</p>	<p>1. Indonesia tidak dapat memberikan data-data valid terkait kondisi Papua terkini kepada negara-negara Melanesia.</p> <p>2. Indonesia tidak dapat memberiakan influence kepada negara-negara Melanesia terhadap kebijakan luar negeri mereka</p>

		<p>berkembang di Kawasan Pasifik Selatan.</p> <p>3. Indonesia tidak perlu mengirimkan teknisi-teknisi untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia di negara-negara Melanesia.</p> <p>4. Indonesia cukup menggunakan Hak Jawab dalam setiap pertanyaan atau tuduhan dari negara-negara Melanesia terhadap Indonesia terkait isu Papua.</p> <p>5. Indonesia dapat memanggil pulang utusan diplomatik ataupun konsulat yang bertugas di negara-negara Melanesia.</p>	<p>terkait isu Papua.</p> <p>3. Indonesia tidak bisa mengontrol argument maupun tuduhan negara-negara Melanesia kepada Indonesia di forum-forum internasional ataupun media terkait isu Papua.</p> <p>4. Dukungan terhadap kelompok sparatis Papua dari negara-negara Melanesia berpeluang meningkat serta berpeluang bertambah dari negara-negara di luar Melanesia.</p> <p>5. Kelompok spartis Papua akan semakin leluasa geraknya serta memberikan data-data yang kurang valid terkait kondisi Papua kepada negara-negara Melanesia.</p> <p>6. Semakin memperburuk citra Indonesia di dunia internasional.</p>
--	--	---	---

Dari ketiga alternatif yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa alternatif nomor 1 (satu) lah yang memiliki keuntungan paling banyak, yaitu 9 (sembilan) dan kerugian paling sedikit, yaitu 3 (tiga) dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Sebagai Aktor Rasional, pemerintah Indonesia tentu saja mengambil alternatif yang memiliki kalkulasi keuntungan terbesar dan kerugian paling kecil bagi Indonesia.

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis menarik sebuah hipotesa dari penelitian ini bahwa **Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2016) meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara Melanesia** karena :

Pertimbangan rasional untuk semakin mempersempit ruang gerak diplomasi kelompok separatis Papua *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*, khususnya dukungan dari luar negeri.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama (Jatmika, 2016, hal. 88). Pengumpulan informasi dalam metode ini menggunakan fakta-fakta dari data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, *website* dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data-data atau bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, *website* dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya.

3. Teknik Analisa

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian deskriptif analitis. Sehingga data yang diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan.

E. Tujuan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, terdapat beberapa aspek yang menjadi tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan rasional dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia.
2. Untuk mengetahui lebih jauh kepentingan nasional yang ingin diraih oleh Indonesia dari peningkatan hubungan dengan negara-negara Melanesia.

F. Batasan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan dalam skripsi ini dengan judul “Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Meningkatkan Hubungan Dengan Negara-Negara Melanesia Di Era Presiden Joko Widodo 2014-2016”, maka penulis memberikan batasan penelitian berupa batasan pembahasan pada tahun 2014-2016. Dalam kurun waktu tersebut pada tahun 2014 menjadi tahun dimana Presiden Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sementara pada tahun 2016, Indonesia melalui pengaruhnya di MSG berhasil menggagalkan upaya *United Liberation Movement for West*

Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota MSG. Negara-negara Melanesia yang dimaksud dalam skripsi ini dibatasi dengan negara-negara yang tergabung dalam *Melanesia Spearhead Group (MSG)* yang anggotanya terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, Vanuatu dan *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS)* Kaledonia Baru.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi penjabaran menjadi beberapa bab yang saling memiliki keterkaitan. Berikut adalah perumusan 5 (lima) bab dalam karya skripsi ini :

BAB I akan berisi garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, aplikasi teori, metode penulisan, tujuan penulisan, batasan penelitian, serta sistematika penulisan bab-bab selanjutnya.

BAB II akan membahas secara singkat tentang Melanesia dan perkembangannya serta sejarah hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara Melanesia sebelum era Presiden Joko Widodo.

BAB III akan membahas tentang bukti-bukti peningkatan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara Melanesia di era Presiden Joko Widodo.

BAB IV akan membahas alasan rasional pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara Melanesia.

BAB V akan membahas bagian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah.